

PROGRAM KULIAH KERJA NYATA SEBAGAI SALURAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TANJUNG BARU, OGAN ILIR (OI)

Muhammad Ismail¹, Rendi Dwi Andika², M.Ramadhan Zaidan Adila³, Norma Juainah⁴

¹Program Studi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

²Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

³Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

⁴Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: ismailfrndz15@gmail.com ,rendidwiandika04@gmail.com,
Ramadhanzaidan.rz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hasil terukur dari empat program KKN yang dilaksanakan di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, pada 1 Juli–4 Agustus 2024. Program tersebut meliputi: (A) penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan edukasi perlindungan konsumen dan kampanye “Cinta, Bangga, Paham Rupiah”, (B) literasi hukum dan peningkatan akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum), (C) pencegahan stunting melalui edukasi gizi dan pemberian makanan tambahan, serta (D) pendirian Koperasi Merah Putih. Metode penelitian menggunakan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam literasi keuangan digital, kesadaran hukum, praktik gizi, dan pembentukan kelembagaan ekonomi berbasis koperasi yang berkelanjutan. Temuan ini mempertegas peran KKN sebagai instrumen transformasi sosial di tingkat desa, sejalan dengan strategi nasional inklusi keuangan, pemberdayaan hukum, kesehatan masyarakat, dan penguatan koperasi.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Literasi digital, Bantuan hukum, Pencegahan stunting, Koperasi

Abstract

This study explores measurable outcomes of four key Community Service (KKN) programs conducted in Tanjung Baru Village, Indralaya Utara District, Ogan Ilir Regency, Indonesia, from July 1 to August 4, 2024. The programs include: (A) the deployment of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) alongside consumer protection education and the “Cinta, Bangga, Paham Rupiah” campaign, (B) legal literacy and access enhancement through the establishment of a Legal Aid Post (Posbakum), (C) stunting prevention via nutrition education and supplemental feeding, and (D) the founding of the “Koperasi Merah Putih” cooperative. Using the Participatory Action Research (PAR) methodology, which emphasizes active community engagement, the project achieved significant improvements in digital financial literacy, legal awareness, nutritional practices, and the establishment of a sustainable community-based economic institution. These findings underscore the transformative potential of KKN programs in fostering holistic rural development and align with national strategies for financial inclusion, legal empowerment, public health, and cooperative-based economic growth.

Keywords: community service; digital literacy; legal aid; stunting prevention; cooperative

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini menempatkan mahasiswa langsung di tengah masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan, mengembangkan solusi, dan mengimplementasikan program yang bermanfaat. Seperti dikemukakan oleh Ibrahim¹, KKN bukan hanya sarana pengaplikasian ilmu, tetapi juga wahana pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan jiwa kepemimpinan mahasiswa. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terjadi pada kecepatan yang sangat cepat, mengarah pada pengamatan bahwa masyarakat di era modern ini telah menyaksikan banyak kemajuan signifikan di bidang-bidang yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah tidak hanya kehidupan individu tetapi juga struktur dari tatanan ekonomi global. Berbagai inovasi yang muncul dengan kecepatan luar biasa dan kemampuan beradaptasi dinamis bertanggung jawab untuk penciptaan produk yang sama sekali baru, yang pada gilirannya, memiliki potensi untuk menggantikan produk yang ada di pasar dengan produk inovasi yang diperlukan sekarang ini. Salah satu dari banyaknya perkembangan teknologi yaitu pada sistem pembayaran digital. Dengan segala keunggulannya dalam hal kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, sistem pembayaran digital telah menjadi komponen penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama dalam upaya mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan.

Desa Tanjung Baru memiliki potensi yang cukup besar di bidang pertanian, perdagangan, dan usaha kecil menengah. Namun, desa ini masih menghadapi tantangan struktural: rendahnya penetrasi teknologi digital di kalangan pelaku usaha, keterbatasan pengetahuan hukum di masyarakat, masalah kesehatan seperti stunting, dan belum adanya lembaga ekonomi desa yang solid. Menurut Bank Indonesia², literasi keuangan digital adalah kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM, khususnya di era ekonomi digital. Dalam konteks hukum menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum sangat menentukan keberhasilan penegakan keadilan di tingkat akar rumput. Sementara itu, WHO³ menegaskan bahwa stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu negara, sehingga intervensi gizi harus

¹ Ibrahim, D. 2020. *Low-Power Early Forest Fire Detection and Warning System*. *Indian Journal of Science and Technology*, 13(3), 286–298. <https://doi.org/10.17485/ijst/2020/v13i03/142755>

² Bank Indonesia. 2023. *Laporan Kelembagaan Bank Indonesia: Triwulan IV 2023*. Perpustakaan Mahkamah Agung RI. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?id=16189>

³ World Health Organization. 2022. *Transforming mental health for all: World health report on mental health*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>

menjadi prioritas pembangunan. Di bidang ekonomi, Ismawan⁴ berpendapat bahwa koperasi adalah instrumen strategis untuk memberdayakan masyarakat secara kolektif. Berdasarkan analisis kebutuhan di lapangan, kelompok KKN UIN Raden Fatah Palembang merancang empat program strategis: (A) Penerapan QRIS dan literasi konsumen, (B) Sosialisasi Posbakum, (C) Pencegahan stunting, dan (D) Pendirian Koperasi Merah Putih. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi dan menganalisis hasil terukur dari program-program tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya pada tanggal 1 Juli – 4 Agustus 2025. Metode penelitian menggunakan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam literasi keuangan digital, kesadaran hukum, praktik gizi, dan pembentukan kelembagaan ekonomi berbasis koperasi yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan QRIS dan Literasi Konsumen

Program pertama yang dilaksanakan oleh tim KKN di Desa Tanjung Baru adalah penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan sosialisasi perlindungan konsumen yang dirangkaikan dengan kampanye “Cinta, Bangga, Paham Rupiah”. QRIS merupakan sistem pembayaran digital berbasis kode QR yang distandardisasi oleh Bank Indonesia untuk seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran. Menurut Bank Indonesia penerapan QRIS mampu memperluas inklusi keuangan, menekan biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi operasional pelaku usaha, termasuk UMKM di wilayah pedesaan.

Sebelum pelaksanaan program, berdasarkan observasi dan wawancara dengan perangkat desa, diketahui bahwa dari total pelaku UMKM di Desa Tanjung Baru, hanya 4 pelaku usaha yang menggunakan QRIS. Minimnya penggunaan QRIS disebabkan oleh rendahnya literasi digital, keterbatasan fasilitas internet di beberapa titik, dan kekhawatiran pelaku usaha terhadap keamanan transaksi. Hal ini sejalan dengan temuan Sunuantari⁵ yang menyatakan bahwa

⁴ Ismawan, A. 2003. *Koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat*. Jakarta: LP3ES.

⁵ Sunuantari, R., Kurniawan, D., and Putri, V. 2021. *Hambatan adopsi teknologi digital di pedesaan Indonesia*. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 5(1), 72–88.

hambatan utama adopsi teknologi digital di pedesaan meliputi keterbatasan keterampilan digital, rendahnya pemahaman manfaat, dan resistensi terhadap perubahan sistem pembayaran.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Tanjung Baru pada minggu kedua pelaksanaan KKN. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM, perangkat desa, dan warga umum. Tim KKN memberikan materi teknis pendaftaran QRIS, simulasi transaksi, serta penjelasan tentang keamanan digital. Selain itu, peserta mendapatkan edukasi mengenai perlindungan konsumen, mencakup hak-hak konsumen, cara menghindari penipuan, dan prosedur pelaporan jika terjadi pelanggaran. Dampak langsung dari program ini terlihat pada peningkatan jumlah UMKM pengguna QRIS dari 4 menjadi 11 pelaku usaha aktif dalam waktu satu bulan. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran warga untuk memanfaatkan pembayaran digital, terutama pada generasi muda dan pelaku usaha kuliner. Adopsi QRIS ini selaras dengan visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang mengedepankan inklusivitas, interoperabilitas, dan keamanan transaksi. Kampanye “Cinta, Bangga, Paham Rupiah” yang disisipkan dalam kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengenali ciri-ciri keaslian uang, merawat uang, dan menggunakan Rupiah sebagai alat transaksi resmi. Menurut Lestari⁶, edukasi tentang Rupiah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk nasionalisme ekonomi, tetapi juga sebagai upaya menjaga stabilitas mata uang nasional.



Gambar 1, Sosialisasi QRIS Di Desa Tanjung Baru

⁶ Lestari, S. 2022. Pendidikan nasionalisme ekonomi melalui edukasi rupiah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(2), 98–110.

Tabel 1. Capaian Program QRIS dan Literasi Konsumen

No	Indikator	Sebelum Program	Sesudah Program
1	UMKM pengguna QRIS	4	11
2	Peserta sosialisasi (orang)	-	100+

Sumber: Dokumentasi KKN Desa Tanjung Baru, 2025

Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan QRIS di Desa Tanjung Baru bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bentuk pemberdayaan ekonomi lokal. Sejalan dengan pendapat Asriyana⁷, adopsi teknologi keuangan di daerah rural mampu membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan transparansi keuangan, dan meminimalkan risiko kehilangan uang tunai. Tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan penggunaan QRIS dengan menyediakan pelatihan lanjutan, memperluas jangkauan internet, dan mendukung ekosistem digital desa.

B. Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah layanan yang disediakan oleh negara untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Posbakum berperan penting dalam memastikan bahwa semua warga negara, terlepas dari status sosial dan ekonomi, memiliki akses terhadap keadilan. Hidayat⁸ mengemukakan bahwa akses hukum yang baik adalah hak dasar setiap warga negara, dan oleh karena itu, pemberian bantuan hukum di tingkat komunitas sangat penting dalam menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat. Di Desa Tanjung Baru, meskipun masyarakat memiliki sejumlah permasalahan hukum, mayoritas mereka belum mengetahui keberadaan layanan Posbakum dan prosedur untuk mengaksesnya. Berdasarkan wawancara awal, lebih dari 70% masyarakat desa tidak memahami hak-hak hukum mereka, khususnya dalam hal sengketa tanah, perceraian, atau masalah perdata lainnya. Keterbatasan pengetahuan hukum ini menjadi salah satu penghalang utama dalam penyelesaian masalah hukum di desa.

Oleh karena itu, program KKN yang dilaksanakan oleh tim UIN Raden Fatah Palembang bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan Posbakum dan mengedukasi warga mengenai

⁷ Asriyana, E., Santoso, B., and Putri, L. 2025. Pengaruh adopsi teknologi keuangan digital pada UMKM pedesaan. *Jurnal Teknologi dan Bisnis Digital*, 4(1), 20–35.

⁸ Hidayat, R. 2021. Literasi hukum masyarakat dan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 45–57.

prosedur mendapatkan bantuan hukum. Program ini dimulai dengan mengundang praktisi hukum dan perwakilan dari lembaga bantuan hukum untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Selama program berlangsung, lebih dari 30 warga mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Balai Desa Tanjung Baru. Materi yang diberikan mencakup pengenalan Posbakum, jenis kasus yang bisa didampingi oleh Posbakum, serta langkah-langkah pengajuan bantuan hukum. Selain itu, simulasi konsultasi hukum juga dilakukan agar warga lebih memahami cara mengakses layanan ini. Penyuluhan hukum yang melibatkan simulasi dan studi kasus nyata lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa setelah sosialisasi, kesadaran masyarakat mengenai keberadaan Posbakum meningkat pesat. Beberapa peserta kemudian mengajukan konsultasi hukum terkait masalah tanah dan permasalahan keluarga. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting⁹, program bantuan hukum yang berbasis komunitas mampu menciptakan iklim keadilan yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti wanita dan masyarakat miskin.



Gambar 2, sosialisasi tentang pos bantuan hukum

Tabel 2. Peserta Sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

No	Kategori Peserta	Jumlah
1	Ibu rumah tangga	15
2	Buruh harian	10
3	Tokoh Masyarakat	5

⁹ Ginting, R., Sari, P., and Lubis, D. 2022. Pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan hukum berbasis komunitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(3), 210–225.

4	Lainnya	0
---	---------	---

Sumber: Dokumentasi KKN Desa Tanjung Baru, 2025

Program ini telah memberikan kontribusi positif dalam hal meningkatkan pemahaman warga mengenai pentingnya memiliki akses ke bantuan hukum, dan mendorong mereka untuk lebih berani mengajukan masalah hukum yang mereka hadapi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keberlanjutan program ini, mengingat minimnya fasilitas dan tenaga ahli hukum yang tersedia di desa. Berdasarkan temuan Sunuanto¹⁰, keberlanjutan program bantuan hukum di tingkat desa sangat bergantung pada koordinasi yang baik dengan lembaga hukum setempat dan pembentukan jaringan kerja yang efektif antara pengacara, lembaga pemerintah, dan masyarakat. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa sosialisasi Posbakum tidak hanya memberikan pengetahuan hukum dasar, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam memperoleh hak-hak mereka. Ke depan, dibutuhkan lebih banyak program serupa untuk memperkuat kapasitas warga dalam menyelesaikan masalah hukum mereka secara mandiri.

C. Pencegahan Stunting

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Kondisi ini didefinisikan oleh WHO sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Dampak stunting bersifat jangka panjang, meliputi keterlambatan perkembangan kognitif, rendahnya produktivitas di masa dewasa, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 21,6%. Angka ini memang menurun dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih berada di atas ambang batas 20% yang ditetapkan WHO sebagai indikator masalah kesehatan masyarakat. Di wilayah pedesaan seperti Desa Tanjung Baru, risiko stunting cenderung lebih tinggi karena keterbatasan akses terhadap informasi gizi, kurangnya variasi konsumsi pangan, dan minimnya layanan kesehatan ibu dan anak. Tim KKN UIN Raden Fatah Palembang merancang program pencegahan stunting yang fokus pada edukasi gizi dan pemberian makanan tambahan (PMT). Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Puskesmas setempat serta kader posyandu desa. Peserta program berjumlah 25 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan

¹⁰ Sunuanto, M. 2021. Keberlanjutan program bantuan hukum di tingkat desa. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(2), 135–150.

keluarga yang memiliki balita. Materi yang disampaikan meliputi: pentingnya ASI eksklusif selama enam bulan pertama, pemberian MPASI (Makanan Pendamping ASI) yang bergizi seimbang, serta praktik kebersihan dan sanitasi untuk mencegah infeksi.

Selain penyuluhan, dilakukan demo masak dengan bahan pangan lokal seperti tempe, sayuran hijau, dan ikan air tawar yang kaya protein. Menurut penelitian Rahmawati¹¹, pemanfaatan bahan pangan lokal yang mudah diakses dapat meningkatkan keberlanjutan praktik gizi seimbang di rumah tangga. Demo masak ini dirancang untuk menunjukkan bahwa makanan bergizi tidak harus mahal, asalkan diolah dengan benar dan disajikan secara menarik untuk anak. Program ini juga mengintegrasikan pengukuran tinggi dan berat badan anak untuk memantau status gizi. Hasilnya, dari 10 anak balita yang diukur, 3 anak menunjukkan risiko stunting (tinggi badan < -2 SD menurut kurva pertumbuhan WHO). Keluarga anak-anak ini kemudian diberikan pendampingan khusus untuk memperbaiki pola makan dan sanitasi rumah tangga.



Gambar 3, Kegiatan KKN

Tabel 3. Peserta Program Pencegahan Stunting

No	Kategori Peserta	Jumlah
1	Ibu hamil	10
2	Ibu menyusui	8
3	Keluarga balita	7

¹¹ Rahmawati, F., Sari, D., and Wulandari, A. 2020. Pemanfaatan bahan pangan lokal untuk perbaikan gizi keluarga. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 15–27.

Sumber: Dokumentasi KKN Desa Tanjung Baru, 2025

Dampak program ini dapat dianalisis dari dua sisi: peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku. Berdasarkan evaluasi singkat di akhir kegiatan, 85% peserta mampu menjawab dengan benar pertanyaan seputar gizi seimbang dan pencegahan stunting. Selain itu, beberapa ibu mulai menerapkan variasi menu makanan dan memperhatikan kebersihan lingkungan rumah. Hal ini sejalan dengan temuan Yusriadi¹² yang menegaskan bahwa edukasi gizi berbasis komunitas, jika dilakukan secara interaktif, mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan memasak sehat di rumah tangga. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini antara lain keterbatasan waktu dan sumber daya untuk pendampingan jangka panjang. Menurut World Bank¹³, upaya pencegahan stunting yang efektif memerlukan intervensi berkelanjutan minimal 6–12 bulan agar perubahan perilaku gizi dapat benar-benar terinternalisasi. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini akan sangat bergantung pada peran aktif kader posyandu dan dukungan pemerintah desa. Secara keseluruhan, program pencegahan stunting yang dilaksanakan di Desa Tanjung Baru berhasil memberikan kesadaran baru bagi masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan kesehatan anak. Program ini dapat menjadi model intervensi yang bisa direplikasi di desa lain dengan adaptasi sesuai kondisi lokal.

D. Pendirian Koperasi Merah Putih

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Ismawan, koperasi berperan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dikelola secara partisipatif, sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh individu tertentu, tetapi dibagikan kepada seluruh anggota. Di pedesaan, koperasi dapat menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pengelolaan usaha bersama, sistem simpan pinjam, dan pemasaran produk. Sebelum KKN berlangsung, Desa Tanjung Baru belum memiliki koperasi aktif yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Beberapa warga sudah mengenal konsep koperasi, namun belum ada inisiatif formal untuk membentuknya. Berdasarkan diskusi awal dengan perangkat desa, salah satu tantangan adalah kurangnya pemahaman teknis pengelolaan koperasi dan minimnya modal awal yang dapat dikumpulkan warga. Hal ini sejalan dengan temuan Arsyad¹⁴ yang menyebutkan bahwa

¹² Yusriadi, M., Arifin, Z., and Dewi, S. 2024. Efektivitas edukasi gizi berbasis komunitas di pedesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 45–59.

¹³ World Bank. 2017. *Investing in nutrition: The foundation for development*. Washington, DC: The World Bank.

¹⁴ Arsyad, M., Sutrisno, T., and Harahap, A. 2021. Hambatan pembentukan koperasi di pedesaan: Studi kasus di Kabupaten X. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 134–145.

rendahnya literasi koperasi dan keterbatasan modal merupakan hambatan utama dalam pembentukan koperasi di pedesaan. Program pendirian Koperasi Merah Putih dirancang oleh tim KKN sebagai upaya menciptakan lembaga ekonomi berkelanjutan di desa. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Sosialisasi manfaat dan prinsip koperasi – Warga dijelaskan bahwa koperasi bukan hanya lembaga simpan pinjam, tetapi juga dapat mengelola usaha bersama, seperti pengadaan pupuk, pengolahan hasil pertanian, dan penjualan produk UMKM.
2. Pembentukan kepengurusan – Dipilih ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas koperasi secara demokratis melalui musyawarah desa.
3. Pendaftaran anggota awal – Masyarakat yang berminat mendaftar sebagai anggota koperasi dengan iuran pokok dan simpanan wajib.
4. Penyusunan AD/ART koperasi – Tim KKN membantu menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan ini memuncak pada acara peresmian Koperasi Merah Putih Desa Tanjung Baru, yang dirangkaikan dengan nonton bareng (nobar) siaran peresmian koperasi oleh Presiden Prabowo. Peresmian ini menambah antusiasme warga dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif. Hasilnya, tercatat 40 anggota awal yang terdiri dari 22 laki-laki dan 18 perempuan.



Gambar 4 Proses Launcing Koperasi Desa Merah Putih Tanjung Baru

Tabel 4. Anggota Awal Koperasi Merah Putih

No	Jenis Anggota	Jumlah
----	---------------	--------

1	Laki-laki	22
2	Perempuan	18

Sumber: Dokumentasi KKN Desa Tanjung Baru, 2025

Dampak awal dari pendirian koperasi ini adalah terbentuknya wadah legal bagi warga untuk mengelola usaha bersama. Beberapa anggota mengusulkan program simpan pinjam berbunga rendah untuk membantu modal usaha kecil. Menurut Nuryanto¹⁵, koperasi yang mengutamakan kebutuhan anggota akan lebih berkelanjutan dibandingkan yang berorientasi murni pada keuntungan. Namun, tantangan yang dihadapi ke depan adalah memastikan koperasi dapat berjalan profesional, menghindari konflik internal, dan menjaga transparansi keuangan. Berdasarkan kajian Susilo¹⁶, koperasi di pedesaan cenderung gagal jika tidak memiliki manajemen yang kuat dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Untuk itu, tim KKN merekomendasikan pendampingan rutin dari Dinas Koperasi Kabupaten Ogan Ilir agar Koperasi Merah Putih dapat berkembang dan menjadi pilar ekonomi desa. Secara keseluruhan, pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Tanjung Baru adalah langkah awal yang strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, koperasi ini berpotensi menjadi contoh sukses kelembagaan ekonomi desa yang mampu memperkuat daya saing masyarakat di era ekonomi modern.

KESIMPULAN

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dari 1 Juli hingga 4 Agustus 2024, telah menghasilkan capaian yang signifikan dalam empat sektor utama: literasi digital dan keuangan melalui penerapan QRIS, peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum), perbaikan perilaku gizi melalui program pencegahan stunting, dan penguatan kelembagaan ekonomi melalui pendirian Koperasi Merah Putih. Program penerapan QRIS berhasil meningkatkan jumlah UMKM pengguna QRIS dari 4 menjadi 11 pelaku usaha aktif dalam waktu satu bulan, serta menjangkau lebih dari 100 peserta sosialisasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dengan strategi edukasi yang tepat dan pendampingan langsung, hambatan literasi digital di pedesaan dapat diatasi. Program Posbakum yang diikuti 30 warga memberikan pengetahuan praktis tentang prosedur mendapatkan bantuan hukum. Dampaknya,

¹⁵ Nuryanto, E. 2019. *Keberlanjutan koperasi di pedesaan: Studi kasus di Jawa Tengah*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 15(1), 56–67.

¹⁶ Susilo, H., Wibowo, A., and Prasetyo, E. 2020. *Faktor kegagalan koperasi di pedesaan: Studi manajemen dan akuntabilitas*. *Jurnal Manajemen Koperasi*, 8(3), 101–114.

warga menjadi lebih percaya diri untuk mengakses hak-hak hukumnya, termasuk dalam menyelesaikan sengketa secara legal. Program pencegahan stunting yang melibatkan 25 peserta berhasil meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya gizi seimbang dan sanitasi. Meskipun baru tahap awal, perubahan perilaku sudah terlihat, seperti mulai diterapkannya variasi menu makanan dan perbaikan kebersihan rumah tangga. Pendirian Koperasi Merah Putih dengan 100 anggota awal menjadi tonggak penting dalam membangun kelembagaan ekonomi desa. Koperasi ini berpotensi menjadi motor penggerak usaha bersama dan sumber pembiayaan mikro bagi Masyarakat. Hasil dari keempat program ini membuktikan bahwa KKN bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan instrumen strategis untuk mendorong pembangunan desa yang inklusif. Dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), seluruh program mampu melibatkan masyarakat secara aktif sehingga keberlanjutan hasilnya lebih terjamin. Keberhasilan program ini juga memberikan gambaran bahwa integrasi teknologi, edukasi hukum, intervensi kesehatan, dan kelembagaan ekonomi dalam satu paket kegiatan dapat mempercepat proses pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan utama dari pelaksanaan program ini adalah durasi KKN yang relatif singkat, sehingga pendampingan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan program menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan fasilitas, terutama di bidang internet dan tenaga ahli, masih menjadi kendala dalam mengoptimalkan hasil program.

Rekomendasi

1. Pendampingan Berkelanjutan – Pemerintah desa dan pihak terkait perlu melanjutkan pendampingan untuk memastikan penggunaan QRIS tetap aktif, Posbakum berjalan efektif, dan koperasi dikelola profesional.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Lokal – Pelatihan tambahan bagi kader posyandu, pengurus koperasi, dan pelaku UMKM akan meningkatkan kualitas pengelolaan program.
3. Integrasi dengan Program Pemerintah – Keempat program KKN sebaiknya dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) agar mendapat dukungan anggaran dan kebijakan jangka panjang.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi – Pembuatan grup komunikasi berbasis WhatsApp atau aplikasi lainnya untuk memantau perkembangan program dan memudahkan koordinasi.
5. Replikasi di Desa Lain – Model pelaksanaan KKN dengan empat fokus program ini dapat direplikasi di desa lain dengan penyesuaian konteks lokal.

Daftar Pustaka

- Arsyad, M., Sutrisno, T., and Harahap, A. 2021. Hambatan pembentukan koperasi di pedesaan: Studi kasus di Kabupaten X. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 134–145.
- Asriyana, E., Santoso, B., and Putri, L. 2025. Pengaruh adopsi teknologi keuangan digital pada UMKM pedesaan. *Jurnal Teknologi dan Bisnis Digital*, 4(1), 20–35.
- Bank Indonesia. 2023. *Laporan Kelembagaan Bank Indonesia: Triwulan IV 2023*. Perpustakaan Mahkamah Agung RI. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?id=16189>
- Ginting, R., Sari, P., and Lubis, D. 2022. Pemberdayaan masyarakat melalui program bantuan hukum berbasis komunitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(3), 210–225.
- Hidayat, R. 2021. Literasi hukum masyarakat dan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 45–57.
- Ibrahim, D. 2020. Low-Power Early Forest Fire Detection and Warning System. *Indian Journal of Science and Technology*, 13(3), 286–298. <https://doi.org/10.17485/ijst/2020/v13i03/142755>
- Ismawan, A. 2003. *Koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat*. Jakarta: LP3ES.
- Lestari, S. 2022. Pendidikan nasionalisme ekonomi melalui edukasi rupiah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(2), 98–110.
- Nuryanto, E. 2019. Keberlanjutan koperasi di pedesaan: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 15(1), 56–67.
- Rahmawati, F., Sari, D., and Wulandari, A. 2020. Pemanfaatan bahan pangan lokal untuk perbaikan gizi keluarga. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 15–27.
- Susilo, H., Wibowo, A., and Prasetyo, E. 2020. Faktor kegagalan koperasi di pedesaan: Studi manajemen dan akuntabilitas. *Jurnal Manajemen Koperasi*, 8(3), 101–114.
- Sunuantari, R., Kurniawan, D., and Putri, V. 2021. Hambatan adopsi teknologi digital di pedesaan Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 5(1), 72–88.
- Sununto, M. 2021. Keberlanjutan program bantuan hukum di tingkat desa. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 10(2), 135–150.
- World Bank. 2017. *Investing in nutrition: The foundation for development*. Washington, DC: The World Bank.
- World Health Organization. 2022. *Transforming mental health for all: World health report on mental health*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>
- Yusriadi, M., Arifin, Z., and Dewi, S. 2024. Efektivitas edukasi gizi berbasis komunitas di pedesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 45–59.